

Peran Tokoh Masyarakat dalam Deteksi Dini Konflik Sosial untuk Penguatan Moderasi Beragama

Naibin

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
naibinn44@gmail.com

Abstract. Religious diversity in Tulungagung has repeatedly generated frictions between Islamic organizations, minority groups, and local belief communities, yet studies on how community leaders contribute to early conflict detection remain limited. This research aims to analyze the role of religious leaders in detecting potential conflicts as part of strengthening religious moderation in conflict-prone areas. Using a community-based approach, the study involved religious counselors and representatives of mass organizations from four subdistricts identified by FKUB (Forum Kerukunan antar Umat Beragama) as vulnerable to conflict and radicalism. Data were collected through field observations in areas with a history of inter-group tensions and were followed up with Focus Group Discussions (FGDs) to explore strategies for conflict prevention. Thematic analysis revealed that religious leaders play a crucial role not only as mediators but also as initiators of dialogue mechanisms that allow conflicting groups to engage in inclusive discussion. Their involvement significantly reduced social tensions, particularly by transforming informal gatherings into preventive platforms for identifying potential disputes before escalation. The findings further demonstrate that synergy between religious leaders, local government, and civil society organizations creates a stronger early warning system that integrates local wisdom with institutional support. This study highlights that religious moderation in Tulungagung is most effective when operationalized through concrete practices of early conflict detection, offering a

model that can be replicated in other regions facing similar challenges.

Keywords: *Community Leaders, Early Detection, Social Conflict, Religious Moderation, Tulungagung.*

Abstrak. Keberagaman agama di Tulungagung kerap memunculkan gesekan antara organisasi Islam, kelompok minoritas, maupun komunitas penghayat kepercayaan, namun kajian tentang peran tokoh masyarakat dalam deteksi dini konflik masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tokoh agama dalam mendeteksi potensi konflik sebagai bagian dari penguatan moderasi beragama di wilayah rawan konflik. Dengan menggunakan pendekatan berbasis komunitas, penelitian ini melibatkan penyuluh agama dan perwakilan organisasi kemasyarakatan dari empat kecamatan yang diidentifikasi Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) sebagai rentan terhadap konflik dan penyebaran paham radikal. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan di lokasi yang memiliki sejarah ketegangan antar kelompok, kemudian diperdalam melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk menggali strategi pencegahan konflik. Analisis tematik menunjukkan bahwa tokoh agama tidak hanya berperan sebagai mediator, tetapi juga sebagai inisiator mekanisme dialog yang memungkinkan kelompok berbeda terlibat dalam percakapan inklusif. Keterlibatan mereka terbukti mampu menurunkan ketegangan sosial, khususnya dengan mengubah forum-forum informal menjadi ruang pencegahan bagi munculnya perselisihan sebelum berkembang lebih jauh. Temuan lain menunjukkan bahwa sinergi antara tokoh agama, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil membentuk sistem peringatan dini yang lebih kuat karena memadukan kearifan lokal dengan dukungan kelembagaan. Penelitian ini menegaskan bahwa moderasi beragama di Tulungagung menjadi efektif ketika dioperasionalkan melalui praktik konkret deteksi dini konflik, sekaligus menawarkan model yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan keragaman serupa.

Kata Kunci: *Tokoh Masyarakat, Deteksi Dini, Konflik Sosial, Moderasi Beragama, Tulungagung.*

PENDAHULUAN

Konflik merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial manusia. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, konflik sosial dapat terjadi sebagai akibat dari beragam faktor, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Perbedaan latar belakang agama, etnis, budaya, dan kelas sosial menjadi beberapa faktor yang kerap memicu terjadinya konflik. Selain itu, konflik politik juga sering kali menjadi pemicu ketegangan sosial yang berujung pada instabilitas di berbagai daerah.¹ Pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai kebijakan guna mengatasi konflik sosial di masyarakat. Salah satu instrumen hukum yang mengatur tentang pencegahan konflik adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang ini menegaskan pentingnya pencegahan konflik melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem deteksi dini.²

Selain itu, konsep kewaspadaan dini masyarakat juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006. Peraturan ini menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat melalui sistem peringatan dini konflik atau Conflict Early Warning System (CEWS).³ Konsep CEWS awalnya dikembangkan dalam konteks militer selama Perang Dingin untuk memprediksi potensi ancaman, namun kemudian diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai alat untuk mendeteksi konflik sosial dan bencana alam. Dalam konteks Indonesia, sistem ini telah diterapkan di beberapa daerah melalui berbagai program pembangunan perdamaian yang melibatkan masyarakat sipil, termasuk perempuan yang berperan aktif dalam deteksi dini konflik sosial.

Di samping pendekatan berbasis teknologi dan regulasi, pencegahan konflik juga dapat dilakukan melalui pendekatan kearifan lokal. Anshar Suherman mengembangkan konsep kerangka dinamis dan resolusi konflik

¹ Abdul Aziz Sr, 'Transformasi Konflik dan Peran Pemerintah Daerah', *Journal of Urban Sociology*, 2.1 (2019) <<https://doi.org/10.30742/jus.v2i1.609>>.

² Neneng Sobibatu Rohmah and Neneng Sobibatu Rohmah, 'Elit dan Pemekaran Daerah; Konflik Antar Elit Dalam Proses Pembentukan Provinsi Banten', *CosmoGov*, 4.2 (2018) <<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.16133>>.

³ Hadi Suyono, 'Conflict Early Warning System Index as a Preventive Effort', *Journal of Educational, Health and Community Psychology*, 9.1 (2020), doi:10.12928/jehcp.v9i1.15297.

yang menitikberatkan pada partisipasi masyarakat serta pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal sebagai sarana pencegahan konflik. Dalam hal ini, tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam membangun dialog antar kelompok yang berpotensi mengalami perselisihan.⁴ Pendekatan berbasis budaya dan tradisi menjadi kunci dalam meredam ketegangan yang muncul, terutama dalam masyarakat yang memiliki keberagaman tinggi seperti Indonesia. Dalam kerangka moderasi beragama, deteksi dini konflik sosial menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan.⁵ Moderasi beragama mengacu pada sikap dan praktik keagamaan yang inklusif, toleran, serta menghindari ekstremisme dan kekerasan.

Kajian mengenai deteksi dini konflik sosial telah banyak dilakukan dalam berbagai penelitian terdahulu. Misalnya, Penelitian yang dilakukan oleh Sri Widodo Mulyono menjelaskan Keberhasilan kegiatan deteksi dini dan mitigasi konflik sosial yang dilakukan Koramil 05/Pasarkliwon berhasil menekan potensi konflik sosial yang ada dan berhasil memitigasi konflik sosial, sehingga dapat mewujudkan pembangunan ketahanan wilayah yang menyentuh berbagai aspek kehidupan.⁶ Studi yang dilakukan oleh Fitri Dewi Rahmawati mengenai deteksi dini dalam penyelesaian konflik oleh Kesbangpol Provinsi Aceh.⁷ Nurzen, dkk. Menegaskan bahwa deteksi dini konflik merupakan proses penting dalam pencegahan konflik untuk menghindari keadaan lebih kompleks di masyarakat.⁸ Penelitian-penelitian

⁴ Ari Setiarsih, 'Penguatan Identitas Nasional Melalui Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal', *Seminar Nasional PGSD Universitas PGRI Yogyakarta*, 2016.

⁵ Ansar Suherman and Arief Sirajuddin, 'Kearifan Lokal Sebagai Basis Komunikasi Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Dan Komunal', *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 3.2 (2018) <<https://doi.org/10.36636/dialektika.v3i2.152>>.

⁶ Sri Widodo Mulyono, 'Optimalisasi Kemampuan Deteksi Dini Dan Mitigasi Risiko Konflik Oleh Satuan Koramil Dalam Pencegahan Terjadinya Konflik Sosial Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Koramil 05/Pasar Kliwon, Kodim 0735/Surakarta, Jawa Tengah)', *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21.3 (2015), p. 188, doi:10.22146/jkn.15669.

⁷ Fitri Dewi Rahmawati, 'Pengembangan Situs Web Deteksi Dini Kesehatan Jiwa', *Journal of Information Systems for Public Health*, 6.2 (2021), doi:10.22146/jisph.12265.

⁸ M. Nurzen S. and others, 'Pelatihan Deteksi Dini Konflik Sosial Dan Keagamaan Pada Masa Pemilu Di Kabupaten Kerinci Dan Kota Sungai Penuh', *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9.6 (2024), pp. 1047–55, doi:10.33084/pengabdianmu.v9i6.6709.

ini menunjukkan bahwa sistem deteksi dini yang efektif dapat membantu mengidentifikasi potensi konflik sebelum mencapai tahap yang lebih berbahaya. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek teknis dan kebijakan, tanpa secara khusus mengaitkannya dengan moderasi beragama.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, deteksi dini konflik sosial akan dikaji dalam konteks penguatan moderasi beragama.⁹ Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana peran tokoh masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah konflik sosial yang berpotensi mengancam kerukunan antar umat beragama. Dengan memahami hubungan antara deteksi dini konflik dan moderasi beragama, diharapkan dapat ditemukan model atau pendekatan baru yang lebih efektif dalam menjaga harmoni sosial di Indonesia. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran tokoh masyarakat dalam sistem deteksi dini konflik sosial serta kaitannya dengan penguatan moderasi beragama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pencegahan konflik yang lebih komprehensif, berbasis pada pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan keberagaman.

METODE

Penelitian ini diawali dengan observasi lapangan di wilayah rawan konflik (Kecamatan Sendang, Kedungwaru, Boyolangu, dan Rejotangan) untuk memetakan dinamika sosial dan faktor pemicu konflik, dilanjutkan dengan wawancara mendalam bersama penyuluh agama dan ketua ormas keagamaan setempat guna menggali perspektif mengenai penyebab serta mekanisme penyelesaian konflik. Data dianalisis menggunakan analisis tematik melalui tahapan transkripsi, pengkodean terbuka, kategorisasi isu utama (strategi deteksi dini, praktik penyelesaian berbasis kearifan lokal, dan upaya menjaga harmoni sosial), serta interpretasi temuan untuk membangun pemahaman teoritis. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen pendukung, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran

⁹ Agus Akhmadi and Khamim Tohari, 'Evaluasi Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama Di Jawa Timur', *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 10.1 (2022), doi:10.36052/andragogi.v10i1.290.

komprehensif tentang peran tokoh masyarakat dalam memperkuat ketahanan sosial dan moderasi beragama di tengah masyarakat multikultural.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Geografis Kabupaten Tulungagung Jawa Timur

Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki sejarah panjang dan kaya akan nilai budaya. Awalnya, daerah ini hanyalah sebuah wilayah kecil yang berpusat di sekitar alun-alun, yang kini menjadi pusat kota Tulungagung. Nama Tulungagung sendiri berasal dari bahasa Kawi, di mana "tulang" berarti mata air dan "agung" berarti besar. Nama ini mengacu pada keberadaan sumber mata air besar yang menjadi salah satu ciri khas daerah tersebut. Sebelum dikenal dengan nama Tulungagung, wilayah ini lebih luas dan disebut sebagai Ngrowo. Nama Ngrowo masih digunakan hingga awal abad ke-20, sebelum ibu kota kabupaten dipindahkan dari Kalangbret ke Tulungagung. Menurut catatan sejarah, pada tahun 1205 M, wilayah ini mendapat penghargaan dari Raja Daha terakhir, Kertajaya. Sejak tahun 2003, tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung.¹¹

Secara geografis, Kabupaten Tulungagung terletak di ketinggian sekitar 85 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini dikelilingi oleh pegunungan yang menjadikannya memiliki variasi lanskap yang cukup beragam. Kabupaten ini memiliki dataran rendah, dataran sedang, dan dataran tinggi dengan topografi yang bervariasi mulai dari tanah datar, perbukitan, hingga daerah pegunungan. Dataran rendah yang memiliki ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut mendominasi sebagian besar wilayah Tulungagung, kecuali Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang, yang hanya memiliki beberapa desa dengan karakteristik dataran rendah.¹² Sementara itu, dataran sedang dengan ketinggian antara 500 hingga

¹⁰ Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023) <<https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>>.

¹¹ Moch. Zahrul Rismana and Dita - Hendriani, "Sejarah Tombak Kyai Upas Di Kabupaten Tulungagung?," *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 7.2 (2022) <<https://doi.org/10.33373/hstr.v7i2.4898>>.

¹² Danan Tricahyono, Akhmad Arif Musadad, and Triana Rejekiningsih, "Integrasi Media Berbasis Peta Persebaran Candi Hindu-Budha Di Tulungagung

700 meter di atas permukaan laut tersebar di enam desa di Kecamatan Pagerwojo dan lima desa di Kecamatan Sendang. Sedangkan, wilayah dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut mencakup satu desa di Kecamatan Pagerwojo dan dua desa di Kecamatan Sendang.

Kondisi Sosial Keberagamaan di Kabupaten Tulungagung

Keragaman dalam ritual keagamaan masih terus bertahan hingga saat ini. Sebelum pemerintah Indonesia secara resmi mendeklarasikan agama-agama yang diakui secara nasional—Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha—banyak kelompok pemeluk kepercayaan yang sudah ada dan berkembang di berbagai wilayah Nusantara. M. Imron Rosadi menjelaskan bahwa di Tulungagung terdapat berbagai aliran kepercayaan yang telah eksis bahkan sebelum agama-agama yang diresmikan pemerintah lahir. Ia mengungkapkan bahwa ada lebih dari 23 aliran kepercayaan yang hidup dan berkembang di Tulungagung. Beberapa di antaranya adalah Jawa Dipa, Sapta Dharma, Sumarah, Pangestu, dan kelompok-kelompok lain yang tergabung dalam komunitas Penghayat Kepercayaan. Keberagaman ini mencerminkan realitas sosial masyarakat Tulungagung yang plural dan beragam.¹³ Masyarakat Tulungagung juga mempraktikkan tradisi yang merupakan hasil akulturasi berbagai entitas.¹⁴

Namun, di tengah keberagaman tersebut, gesekan antar kelompok keagamaan tidak dapat dihindarkan. Pada tahun 2016, terjadi konflik antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan kelompok Ahmadiyah. Konflik ini mencerminkan bagaimana ketegangan antar kelompok keagamaan bisa muncul ketika ada perbedaan keyakinan yang dianggap menyimpang oleh sebagian pihak. Kemudian, pada tahun 2020, muncul gesekan antara Aliansi Masyarakat Anti Radikalisme (AMAR) dengan kelompok Salafi Wahabi. Massa AMAR yang terdiri dari berbagai elemen organisasi seperti Pemuda Pancasila, Pagar Nusa, GP Ansor, BANSER, LPKAN, APN, PGN, PMII,

Dengan Pendekatan Konstruktivisme Dalam Pembelajaran Sejarah', *Diakronika*, 21.2 (2021), doi:10.24036/diakronika/vol21-iss2/205.

¹³ Wahyu Iryana, 'Fenomena Gerakan Sempalan Islam Di Indonesia', *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam*, 3.1 (2018) <<https://doi.org/10.29300/tjksi.v3i1.1553>>.

¹⁴ Rohman, K., Rahma, M. I. F. M., & Wirdah, N. (2021). Harmonious Values of Kupatan Tradition on Plosokandang Society, Tulungagung. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 29(1), 46-63.

Karang Taruna, IPNU, Fatayat NU, dan Gusdurian, berhadapan dengan kelompok Salafi Wahabi yang dianggap memiliki pandangan keagamaan yang berpotensi memicu radikalisme.¹⁵

Selain konflik internal antar organisasi Islam, di Tulungagung juga pernah terjadi konflik antara kelompok Islam dengan komunitas Bahai. Selain itu, terdapat pula gesekan antara masyarakat penganut kepercayaan lokal dengan pihak yang ingin mendirikan wisata religi di kawasan Gunung Budeg. Masyarakat aliran kepercayaan (kejawen) menolak pendirian wisata religi tersebut karena dianggap mengancam keberlangsungan tradisi dan budaya mereka. Konflik-konflik serupa masih banyak terjadi namun tidak selalu mendapat perhatian media. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi dan kampanye tentang pentingnya moderasi beragama di berbagai lini masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari seminar, forum diskusi, hingga pelatihan bagi pemuka agama dan tokoh masyarakat.¹⁶

Menanamkan dan memupuk rasa persaudaraan melalui Focus Group Discussion (FGD) tentang moderasi beragama menjadi langkah yang sangat penting. Moderasi beragama harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di Tulungagung yang memiliki keberagaman agama dan kepercayaan yang cukup tinggi. Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat memahami bahwa perbedaan dalam keyakinan bukanlah alasan untuk berkonflik, melainkan harus menjadi dasar untuk saling mengenal dan menghormati satu sama lain. Konflik sosial dapat didefinisikan sebagai pertentangan baik secara verbal maupun fisik antara dua atau lebih kelompok masyarakat yang berlangsung dalam waktu lama dan berdampak luas. Konflik dapat menimbulkan ketidakamanan, perpecahan sosial, gangguan terhadap stabilitas keamanan, serta menghambat pembangunan nasional. Konflik

¹⁵ Dwi Sulistiani, 'Pendampingan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung', *Egalita*, 13.1 (2019) <<https://doi.org/10.18860/egalita.v13i1.8075>>.

¹⁶ Judianan, Sulastris Rini Rindrayani, and Abdul Manab, 'Pengaruh Kecerdasan Sosial Dan Keaktifan Pemuda Dalam Kegiatan Organisasi Karang Taruna Terhadap Kemampuan Me-Mecahkan Masalah Sosial Di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5.2 (2021).

bukanlah sesuatu yang bisa sepenuhnya dihindari karena merupakan bagian dari dinamika kehidupan sosial manusia.¹⁷

Dari perspektif sejarah, perbedaan antar individu dan kelompok telah ada sejak awal kehidupan manusia. Gagalnya upaya memahami dan mengelola perbedaan sering kali berujung pada konflik. Dalam situasi konflik, masing-masing pihak cenderung mengklaim bahwa pandangan dan keyakinan merekalah yang paling benar. Namun, penting untuk dipahami bahwa konflik memiliki dua sisi, yakni sebagai risiko sekaligus peluang. Di satu sisi, konflik dapat menyebabkan ketegangan dan perpecahan. Namun, di sisi lain, konflik juga bisa menjadi pemicu perubahan sosial yang positif. Konflik dapat mendorong masyarakat untuk mencari solusi bersama, memperjelas pilihan yang tersedia, serta memperkuat kohesi sosial jika ditangani dengan baik. Oleh karena itu, pendekatan dalam menangani konflik tidak boleh hanya berorientasi pada eliminasi ketegangan, tetapi juga harus diarahkan untuk menciptakan kesepahaman dan membangun harmoni sosial.¹⁸

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa di Tulungagung terdapat berbagai organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Ahmadiyah, Al Irsyad Al Islamiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, terdapat pula kelompok Salafi Wahabi yang memiliki pandangan keagamaan yang berbeda dengan organisasi Islam arus utama. Hubungan antar organisasi Islam di Tulungagung tidak selalu berjalan harmonis. Dalam sepuluh tahun terakhir, banyak terjadi gesekan antar kelompok Islam yang berakar dari perbedaan dalam cara memahami ajaran agama.

Strategi Mewujudkan Harmoni Keberagamaan di Kabupaten Tulungagung

Berbagai gesekan dan konflik antara kelompok keagamaan menunjukkan bahwa toleransi masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, diperlukan strategi konkret untuk mewujudkan harmoni keberagamaan guna menciptakan kehidupan sosial yang damai dan inklusif. Di sini, tokoh

¹⁷ Iryana, 'FENOMENA GERAKAN SEMPALAN ISLAM DI INDONESIA'.

¹⁸ Dian Herdiana and Supriatna Nurul, 'Implikasi Tatanan Normal Baru Terhadap Kehidupan Sosial Kemasyarakatan', *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4.2 (2020) <<https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2462>>.

agama dapat mengambil peran strategis dalam mewujudkan harmoni sosial di masyarakat.

Dalam konteks ini, tokoh agama berfungsi sebagai mediator nilai-nilai agama yang tidak hanya membimbing masyarakat dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam pengembangan toleransi, pencegahan konflik, serta penciptaan kerukunan antar umat beragama. Tokoh agama berperan sebagai mediator, pendidik, fasilitator, dan teladan dalam membangun dan menjaga harmoni antarumat beragama. Mereka aktif mempromosikan nilai toleransi, dialog antaragama, serta menyelesaikan konflik melalui mediasi dan musyawarah.¹⁹

Tokoh agama adalah pihak yang memiliki pengaruh penting dalam membentuk sikap toleransi di masyarakat, terutama karena mereka adalah tokoh yang disegani dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam menyikapi perbedaan. Sebagai pemimpin spiritual, tokoh agama dapat menjadi panutan bahwa saling menghormati di antara umat beragama adalah nilai kesederhanaan, dan meluaskan pesan simetri, dan membangun jembatan pengertian yang baik bersama-sama adalah kunci bagi keragaman untuk berjalan sejalan. Sikap mereka, baik dalam interaksi lintas agama maupun dalam peran mereka sebagai mediator dalam konflik sosial, memberikan contoh konkret yang terasa oleh masyarakat pada umumnya.²⁰

Nurfitrija menjelaskan bahwa sayap-sayap perempuan NU (Fatayat dan Muslimat) memainkan peran strategis dalam mengarusutamakan moderasi, terutama di tingkat keluarga dan masyarakat, dengan mempromosikan toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi lokal.²¹ Melalui contoh mengimplementasikan semangat kepedulian terhadap sesama, pengurus Muslimat dan Fatayat Pengurus Anak Cabang Nahdlatul Ulama (PAC NU) Sendang menyerukan bahwa toleransi adalah nilai utama yang perlu diterapkan. Peran yang diambil oleh pimpinan

¹⁹ Antik Milatus Zuhriah, 'Tokoh Agama Dalam Pendidikan Toleransi Beragama Di Kabupaten Lumajang', *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 13.1 (2020), pp. 56–75.

²⁰ R Setiawan, 'Mempertahankan Kehidupan Toleransi Beragama Suku Tengger Bromo Melalui Peran Tokoh Agama', *Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 12.2 (2023), doi:10.26877/civis.v12i2.16389.

²¹ Nadia Nurfitrija, 'The Role Of Fatayat Nu In Mainstreaming Religious Moderation', *Wasilatuna: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 6.2 (2023), doi:10.38073/wasilatuna.v6i02.823.

Muslimat dan Fatayat menjadi contoh dalam sikap dan perilaku, sehingga masyarakat dapat meneladani toleransi dan kerukunan yang dicontohkan secara langsung sehingga meminimalisir terjadinya konflik.

Tokoh agama menjadi penengah dalam menyelesaikan perselisihan antarumat beragama melalui dialog, mediasi, dan musyawarah, sehingga mencegah konflik meluas dan menjaga stabilitas sosial.²² Melalui Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) tokoh-tokoh agama yang terlibat didalamnya mendorong penguatan dialog lintas agama dan aliran kepercayaan. Menurutnya dialog lintas agama harus diperkuat di berbagai level masyarakat, baik di tingkat pemuka agama, organisasi keagamaan, hingga komunitas akar rumput. Forum-forum diskusi yang melibatkan berbagai kelompok keagamaan bisa menjadi wadah untuk mencari titik temu dan mempererat hubungan antar umat. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, kesalahpahaman dan stereotip negatif terhadap kelompok lain dapat diminimalisir, sehingga tercipta rasa saling percaya antar komunitas.

Tokoh agama melalui ormas keagamaan yang dinakodainya berperan mengfungsikan tidak hanya sebagai sarana dakwah akan tetapi sebagai jembatan perdamaian. Organisasi masyarakat Islam (ormas) memiliki peran strategis dalam mewujudkan harmoni dan moderasi agama di Indonesia. Sebagai organisasi yang berbasis pada nilai-nilai agama, ormas Islam dapat menjadi agen perubahan sosial yang mengedepankan prinsip-prinsip toleransi, kerukunan, dan perdamaian antar umat beragama. Salah satu contoh kontribusi ormas Islam dalam menciptakan harmoni adalah melalui kegiatan dakwah yang tidak hanya menekankan pada penyebaran ajaran agama, tetapi juga mengedukasi umat untuk memahami dan menghargai perbedaan. Ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, misalnya, telah lama menjadi pilar penting dalam membangun moderasi beragama dengan mengedepankan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil-alamin, yang mendorong umat untuk hidup berdampingan secara damai, tanpa terjebak pada sikap ekstrem atau intoleran.

Tokoh agama dan pemerintah sebagai fasilitator, mediator dalam mewujudkan harmoni sosial. peran prophetis dari tokoh agama dan

²² Afkarul Azmi, F Fahrudin, and Agus Fakhruddin, 'Actualization of Religious Moderation Through The Role of Spiritual Stores and Community Figures in Lombok', *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8.2 (2024), doi:10.33650/edureligia.v8i2.9199.

pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas sosial dan keberagaman sosial keagamaan. Regulasi yang adil, pengawasan kelompok-kelompok radikal, serta pembentukan forum komunikasi lintas agama perlu terus dikembangkan.

Mewujudkan harmoni keberagaman di Kabupaten Tulungagung bukanlah tugas yang mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang mustahil. Melalui pendekatan kampanye, dialog, penguatan peran ormas, keterlibatan pemerintah, serta pemanfaatan media sosial secara positif, perbedaan dapat menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan bermasyarakat. Kesadaran bahwa keberagaman adalah anugerah harus terus ditanamkan, sehingga konflik antar agama dapat diminimalisir dan masyarakat Tulungagung dapat hidup dalam damai dan harmoni.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama, bukan sekadar simbol moral, tetapi aktor kunci dalam mekanisme deteksi dini konflik melalui keterlibatan langsung di lapangan, misalnya dengan memediasi gesekan antarormas dan memfasilitasi ruang dialog lintas agama di wilayah rawan konflik. Temuan memperlihatkan bahwa keberhasilan deteksi dini sangat dipengaruhi oleh kapasitas tokoh agama dalam membangun jejaring komunikasi horizontal dengan masyarakat serta koordinasi vertikal dengan pemerintah daerah. Instrumen praktis seperti FGD, forum lintas iman, dan lokakarya terbukti berfungsi tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan eskalasi konflik. Dengan demikian, moderasi beragama tidak hadir melalui retorika kebijakan, melainkan melalui praktik kolaboratif yang menekankan respons cepat, keterlibatan komunitas, dan sinergi antara tokoh agama, pemerintah, serta organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat ketahanan sosial di Tulungagung.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhmadi, Agus, and Khamim Tohari, 'Evaluasi Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama Di Jawa Timur', *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 10.1 (2022), doi:10.36052/andragogi.v10i1.290
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, 'Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif

- Dan Kuantitatif, *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023), doi:10.61104/ihsan.v1i2.57
- Aziz SR, Abdul, 'TRANSFORMASI KONFLIK DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH', *Journal of Urban Sociology*, 2.1 (2019), doi:10.30742/jus.v2i1.609
- Azmi, Afkarul, F Fahrudin, and Agus Fakhruddin, 'Actualization of Religious Moderation Through The Role Of Spiritual Stores and Community Figures in Lombok', *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2024, doi:10.33650/edureligia.v8i2.9199
- Haq, Zihni Ainul, 'Narasi Toleransi Beragama Pada Akun Youtube "Jeda Nulis"', *PUSAKA*, 10.1 (2022), doi:10.31969/pusaka.v10i1.673
- Herdiana, Dian, and Supriatna Nurul, 'IMPLIKASI TATANAN NORMAL BARU TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN', *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4.2 (2020), doi:10.38043/jids.v4i2.2462
- Iryana, Wahyu, 'FENOMENA GERAKAN SEMPALAN ISLAM DI INDONESIA', *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam*, 3.1 (2018), doi:10.29300/ttjksi.v3i1.1553
- Judianan, Sulastri Rini Rindrayani, and Abdul Manab, 'Pengaruh Kecerdasan Sosial Dan Keaktifan Pemuda Dalam Kegiatan Organisasi Karang Taruna Terhadap Kemampuan Me-Mecahkan Masalah Sosial Di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5.2 (2021)
- Mulyono, Sri Widodo, 'Optimalisasi Kemampuan Deteksi Dini Dan Mitigasi Risiko Konflik Oleh Satuan Koramil Dalam Pencegahan Terjadinya Konflik Sosial Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Koramil 05/Pasar Kliwon, Kodim 0735/Surakarta, Jawa Tengah)', *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21.3 (2015), p. 188, doi:10.22146/jkn.15669
- Nurfitriana, Nadia, 'The Role Of Fatayat Nu In Mainstreaming Religious Moderation', *Wasilatuna: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 6.2 (2023), doi:10.38073/wasilatuna.v6i02.823
- Rahmawati, Fitria Dewi, 'Pengembangan Situs Web Deteksi Dini Kesehatan Jiwa', *Journal of Information Systems for Public Health*, 6.2 (2021), doi:10.22146/jisph.12265
- Rismana, Moch. Zahrul, and Dita - Hendriani, 'Sejarah Tombak Kyai Upas Di Kabupaten Tulungagung', *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan*

- Sejarah*, 7.2 (2022), doi:10.33373/hstr.v7i2.4898
- Rohman, K., Rahma, M. I. F. M., & Wirdah, N. (2021). Harmonious Values of Kupatan Tradition on Plosokandang Society, Tulungagung. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 29(1), 46-63.
- Rohmah, Neneng Sobibatu, and Neneng Sobibatu Rohmah, 'ELIT DAN PEMEKARAN DAERAH; KONFLIK ANTAR ELIT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN', *CosmoGov*, 4.2 (2018), doi:10.24198/cosmogov.v4i2.16133
- S., M. Nurzen, and others, 'Pelatihan Deteksi Dini Konflik Sosial Dan Keagamaan Pada Masa Pemilu Di Kabupaten Kerinci Dan Kota Sungai Penuh', *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9.6 (2024), pp. 1047–55, doi:10.33084/pengabdianmu.v9i6.6709
- Setiarsih, Ari, 'Penguatan Identitas Nasional Melalui Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal', *Seminar Nasional PGSD Universitas PGRI Yogyakarta*, 2016
- Setiawan, R, 'Mempertahankan Kehidupan Toleransi Beragama Suku Tengger Bromo Melalui Peran Tokoh Agama', *Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 12.2 (2023), doi:10.26877/civis.v12i2.16389
- Suherman, Ansar, and Arief Sirajuddin, 'Kearifan Lokal Sebagai Basis Komunikasi Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Dan Komunal', *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 3.2 (2018), doi:10.36636/dialektika.v3i2.152
- Sulistiani, Dwi, 'Pendampingan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung', *Egalita*, 13.1 (2019), doi:10.18860/egalita.v13i1.8075
- Suyono, Hadi, 'Conflict Early Warning System Index as a Preventive Effort', *Journal of Educational, Health and Community Psychology*, 9.1 (2020), doi:10.12928/jehcp.v9i1.15297
- Tricahyono, Danan, Akhmad Arif Musadad, and Triana Rejekningsih, 'Integrasi Media Berbasis Peta Persebaran Candi Hindu-Budha Di Tulungagung Dengan Pendekatan Konstruktivisme Dalam Pembelajaran Sejarah', *Diakronika*, 21.2 (2021), doi:10.24036/diakronika/vol21-iss2/205
- Zuhriah, Antik Milatus, 'Tokoh Agama Dalam Pendidikan Toleransi Beragama Di Kabupaten Lumajang', *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 13.1 (2020), pp. 56–75